

ABSTRAK

Transportasi penyeberangan memiliki peranan penting dalam mendukung konektivitas antarwilayah kepulauan di Indonesia, khususnya pada daerah Kepulauan Mentawai di Provinsi Sumatera Barat. Salah satu lintasannya adalah Padang–Siberut yang dioperasikan oleh kapal perintis KMP Ambu-Ambu. Penetapan tarif angkutan penyeberangan harus mempertimbangkan kesesuaian antara tarif yang berlaku dengan biaya operasional kapal agar pelayanan dapat berjalan secara berkelanjutan. Namun, sejak diberlakukannya tarif berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 551.5-818-2022 hingga tahun 2025 belum dilakukan evaluasi terhadap kesesuaiannya dengan kondisi operasional kapal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Biaya Operasional Kapal (BOK) KMP Ambu-Ambu pada lintasan Padang–Siberut serta mengevaluasi kesesuaian tarif angkutan penyeberangan yang berlaku dengan kondisi *load factor* aktual. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis kuantitatif dengan mengacu pada PM 66 Tahun 2019. Data yang digunakan meliputi komponen biaya operasional kapal, data produktivitas kapal tahun 2025, data tarif angkutan dan karakteristik kapal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata *load factor* KMP Ambu-Ambu pada lintasan Padang–Siberut sebesar 53,63%. Berdasarkan perhitungan biaya operasional kapal sebesar Rp9.043.303.454 per tahun, diperoleh besaran tarif rencana yang kemudian dibandingkan dengan tarif *existing*. Hasil analisis menunjukkan adanya perbedaan antara tarif *existing* dan tarif berdasarkan perhitungan BOK rata-rata selisih sebesar 124,40% sehingga diperlukan evaluasi kebijakan tarif agar lebih mencerminkan kondisi operasional kapal serta menjaga keberlanjutan pelayanan transportasi penyeberangan perintis.

Kata kunci: tarif angkutan penyeberangan, biaya operasional kapal, *load factor*, kapal perintis.

ABSTRACT

Ferry transportation plays an important role in supporting connectivity between island regions in Indonesia, particularly in the Mentawai Islands region of West Sumatra Province. One of the ferry routes is the Padang–Siberut route operated by the pioneer vessel KMP Ambu-Ambu. The determination of ferry transportation tariffs must consider the compatibility between the applied tariffs and the ship's operational costs to ensure the sustainability of transportation services. However, since the implementation of tariffs based on the Decree of the Governor of West Sumatra Number 551.5-818-2022, no evaluation has been conducted until 2025 regarding their suitability with the current operational conditions of the vessel. This study aims to analyze the Ship Operational Cost (SOC) of KMP Ambu-Ambu on the Padang–Siberut route and evaluate the suitability of the existing ferry transportation tariff with the actual load factor conditions. The research method used is quantitative analysis referring to the Regulation of the Minister of Transportation Number PM 66 of 2019. The data used include ship operational cost components, vessel productivity data for 2025, ferry tariff data and ship characteristics. The results show that the average load factor of KMP Ambu-Ambu on the Padang–Siberut route is 53.63%. Based on the calculation of ship operational costs amounting to IDR 9,043,303,454 per year, Based on this calculation, a proposed tariff was determined and subsequently compared with the existing tariff. The analysis reveals a significant discrepancy, with an average difference of 124.40% between the existing tariff and the SOC-based tariff. Therefore, a tariff policy evaluation is necessary to better reflect actual vessel operational conditions and to ensure the sustainability of pioneer ferry transportation services.

Keywords: *ferry transportation tariff, ship operational cost, load factor, pioneer vessel.*